



**PERJANJIAN KINERJA  
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Buntoro  
Jabatan : Inspektur BPKP

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yusuf Ateh  
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APDP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APDP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021  
Pihak Pertama,

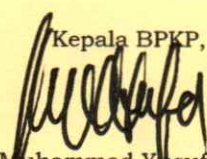
Buntoro  
NIP. 19650118 198503 1 001

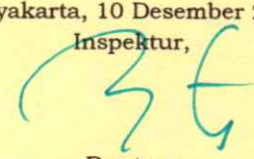


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	1.1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	100
	1.2 Persentase temuan yang berulang	Persen	25
2. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	2.1 Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100
3. Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	3.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan SPIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35
	3.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan MR unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35
4. Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	4.1 Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75
5. meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	5.1 Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100
6. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	6.1 Indeks IEPK BPKP	level	3
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	7.1 Persentase pengaduan yang diselesaikan	Persen	100
8. Meningkatnya kapabilitas inspektorat	8.1 Persentase capaian KPA IACM Level 3	Persen	90
9. meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	9.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	80
	9.2 Skor IKPA unit kerja	Skor	95
	9.3 Persentase BMN dalam kondisi Baik	Persen	80
	9.4 Nilai SAKIP	Nilai	81
	9.5 Persentase Efektivitas Pengendalian	Persen	65
	9.6 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan dan .....	Rp. 1.387.354.000,00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajen	Rp. 7.635.070.000,00
	<u>Rp. 9.022.424.000,00</u>

Kepala BPKP,  
  
 Muhammad Yusuf Ateh  
 NIP 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021  
 Inspektur,  
  
 Buntoro  
 NIP 19650118 198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**INSPEKTORAT**  
**AGENDA PRIORITAS DUKUNGAN PENGAWASAN**

NO	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	I.c.4	Manajemen Kinerja Pengawasan	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Pemantauan dan Evaluasi Informasi atas APP	√	√	√	√
2	III.b.2	Manajemen Keuangan	Perencanaan dan Penganggaran Dukungan Manajemen	Informasi perencanaan dan penganggaran BPKP yang efektif dan efisien	√			
3	V.a.4	Pengendalian Internal	Pengawasan atas Tata Kelola	Peningkatan Mutu atas Hasil Pengawasan	√	√	√	√

**Yogyakarta, 10 Desember 2021**  
**Inspektur,**



**Buntoro**  
**NIP. 19650118 198503 1 001**

**Kepala BPKP,**



**Muhammad Yusuf Atef**  
**NIP. 19640809 198503 1 001**